



Beranda > Opini >

AKUNTANSIANA

Kegagalan Substansial dalam Praktik Akuntabilitas Sektor Publik di Indonesia Pasca-Reformasi

4 April 2026, 16:59 - Opini

BAGIKAN





Oleh: Rousilita Suhendah* – Prof.Dr. Syarifuddin, M.Soc **

HERALDSULSEL – Sejak tahun 2005, Indonesia menerapkan anggaran berbasis kinerja yang mewajibkan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Namun, yang terjadi di lapangan, laporan ini hanya berupa format administratif. Dokumen terlihat akuntabel, namun tingkat kualitas kinerja sektor publik di lapangan tidak mengalami peningkatan signifikan. Ketimpangan informasi yang tajam antara pemerintah sebagai lembaga eksekutif dengan DPRD dan masyarakat, menyebabkan adanya asimetri informasi di lapangan dan distorsi komunikasi.

Distorsi komunikasi informasi terjadi ketika informasi kinerja pemerintah tidak tersampaikan dengan jujur atau mudah dipahami, sehingga pembahasan anggaran tetap menggunakan pola lama (line-item) yang hanya berfokus pada penyerapan uang, bukan hasil bagi masyarakat.

Pejabat publik merasa tertekan oleh aturan teknis yang kaku. Mereka bekerja sekadar untuk memenuhi indikator angka agar terhindar dari sanksi, yang mengakibatkan hilangnya kreativitas dan nilai etis dalam pelayanan publik. Akuntabilitas publik bukan lagi sebagai cerminan dari realitas kinerja, melainkan sebuah "permainan simbol".

Praktik akuntabilitas seperti laporan LAKIP atau opini WTP dianggap sebagai tontonan administratif. Pemerintah lebih fokus menciptakan citra bahwa mereka akuntabel melalui dokumen formal, daripada memperbaiki kualitas pelayanan secara nyata. Ini berarti terjadi hiperrealitas (menurut teori Jean Baudrillard) yaitu suatu kondisi di mana simbol (laporan/angka) menjadi lebih nyata daripada kenyataan (pelayanan publik) itu sendiri. Masyarakat dan pemerintah terjebak pada angka-angka statistik dan simbol-simbol akuntabilitas berupa laporan, piagam penghargaan, dan nilai evaluasi dianggap lebih nyata dan lebih penting daripada kenyataan pelayanan publik itu sendiri. Simbol dan piagam penghargaan seolah-olah menjadi suatu keberhasilan yang sesungguhnya, padahal realitas di lapangan mungkin berbeda.

Sistem akuntabilitas saat ini berfokus pada angka, efisiensi, dan kontrol ekonomi (rasionalitas instrumental). Sistem ini mengabaikan sisi manusiawi, etika, dan ruang kebebasan bagi aktor publik untuk berkreasi dalam melayani masyarakat. Hal ini disebut sebagai "kolonisasi" terhadap dunia kehidupan (lifeworld). Akuntabilitas saat ini yang berfokus pada akuntabilitas hasil (outcome accountability), melupakan adanya aspek akuntabilitas proses. Tanpa adanya transparansi dalam proses dan dialog yang jujur dari pejabat publik, maka hasil kinerja yang dilaporkan dapat menjadi sebuah "simulasi" atau pencitraan angka belaka. Mekanisme akuntabilitas yang ada tersebut belum mampu menciptakan public sphere (ruang publik) seperti yang digagas oleh Habermas.





sebagai sarana komunikasi yang membebaskan dan jujur antara pemerintah dan rakyat, dapat diisi dengan menawarkan konsep akuntabilitas yang berbasis pada "tindakan komunikatif".

Baca juga:

[Rupiah dan Rasa Aman yang Semakin Mahal](#)

Temukan lebih banyak

Informasi terkini >

Berita populer >

Berita Sulsel >

Kejahatan & Keadilan >

Berita Sulawesi Selatan >

Baca juga:

[Menguatkan Karakter Akuntan Berbasis Pancasila di Era Kecerdasan Buatan \(AI\)](#)

Baca juga:

[Antara Algoritma dan Nurani: Masa Depan Audit di Tengah Dominasi AI](#)

Pemandulan ruang publik terjadi saat ini pada akuntabilitas publik, di mana terdapat marjinalisasi, yaitu : 1) Masyarakat tidak diikutsertakan dalam diskusi penetapan anggaran; 2) teknisitas berupa penggunaan bahasa akuntansi yang rumit, baik sengaja maupun tidak sengaja, membuat masyarakat tidak dapat ikut berdebat yang menciptakan adanya asimetri informasi; 3) Formalitas di mana akuntabilitas hanya dianggap sebagai kewajiban untuk memberikan atau menyeter laporan dari pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat, bukan menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat di daerah.

Paradigma New Public Management (NPM) yang diadopsi di sektor publik perlu dievaluasi kembali karena telah "mengkolonisasi" atau menjajah dunia kehidupan (lifeworld) birokrasi dan masyarakat. Fokus New Public Management (NPM) yang terlalu besar pada efisiensi ekonomi dan aturan kaku dapat membelenggu kreativitas serta nilai-nilai etis dalam pelayanan publik. Diperlukan model akuntabilitas baru yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir (output), tetapi pada proses. Tujuan spesifik model akuntabilitas baru tersebut adalah untuk menciptakan bentuk pertanggungjawaban yang memungkinkan terjadinya dialog yang jujur, transparan, dan setara antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut teori Habermas, akuntabilitas dapat menjadi sarana "tindakan komunikatif" yang membangun ruang di mana masyarakat dapat benar-benar berpartisipasi, bertanya, dan mendebat kebijakan secara rasional tanpa adanya tekanan atau distorsi kekuasaan. Ada tiga konsep turunan dari Habermas yang mengkritik proses komunikasi dalam akuntabilitas anggaran yang terjadi di sektor publik, yaitu: 1) Kolonisasi Lifeworld (Dunia Kehidupan). "Sistem" logika uang, kekuasaan, dan aturan birokrasi yang kaku telah menjajah "dunia kehidupan" (nilai etika, moral, dan komunikasi manusiawi). Ini berakibat pejabat publik atau birokrat bekerja hanya karena takut sanksi aturan, bukan karena panggilan moral untuk melayani; 2) Rasionalitas Instrumental dengan Rasionalitas Komunikatif. Rasionalitas instrumental yang mendominasi akuntabilitas saat ini hanya memfokuskan pada efisiensi, pencapaian target angka, dan pengendalian. Rasionalitas Komunikatif berfokus pada pencapaian kesepakatan bersama melalui dialog yang jujur yang dianggap hilang atau "mandul" dalam praktik di tingkat pemerintahan pusat dan daerah; 3) Ruang Publik (Public Sphere) otonom yang hilang. Akuntabilitas seharusnya menjadi sarana dialog, namun dalam kenyataannya, suara masyarakat dimarjinalkan karena bahasa yang digunakan terlalu teknis dan elite (asimetri informasi).

Ada empat Klaim Kesahihan (Validity Claims) yang digunakan untuk menguji apakah akuntabilitas publik tersebut jujur atau tidak, dengan menggunakan empat kriteria komunikasi dari Habermas yaitu : 1) Kebenaran (Truth): Apakah data dalam laporan sesuai fakta?; 2) Kejujuran (Sincerity): Apakah ada niat tulus dari pemerintah untuk terbuka?; 3) Ketepatan Norma (Rightness): Apakah tindakan tersebut sesuai nilai moral masyarakat?; 4) Kejelasan (Comprehensibility): Apakah laporan tersebut mudah dipahami oleh orang awam?.

Oleh karena itu akuntabilitas dari belenggu angka-angka statistik perlu dibebaskan agar kembali menjadi sarana dialog yang memanusiakan warga negara. Akuntabilitas sejati seharusnya adalah "Akuntabilitas Dialogis-Kritis yang membebaskan masyarakat, bukan sekadar "Akuntabilitas Administratif" yang membungkam diskusi publik melalui simbol-simbol formal. Sebuah model yang tidak lagi melihat akuntabilitas sebagai beban pelaporan, melainkan sebagai sarana komunikasi demokratis yang memanusiakan hubungan antara negara dan warga negaranya. (*)

*Dosen Program Studi Akuntansi FEB Universitas Tarumanagara, Mahasiswi S3 PDIA Universitas Hasanuddin Makassar

**Dosen FEB Universitas Hasanuddin Makassar





Powered by GliaStudios

Stay connect With Us :



Akuntansiana

Editor: Marwah

BAGIKAN



Sederet Prestasi Unik Para Artis Transpuan Indonesia

HERBEAUTY



Alesan Posisi Pelukan Ini Fix Paling Bikin Baper Maksimal!

BRAINBERRIES



Penampilan Red Carpet Paling Kontroversial, Bikin Heboh!

BRAINBERRIES





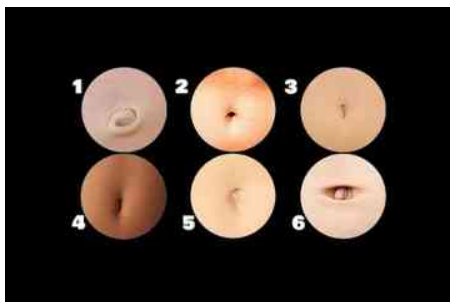
Anjing Terus Gonggong ke Dinding, Rahasianya Bikin Heboh!

BRAINBERRIES



Jinny Oh Jinny Versi Baru? Ini Kata Indra Bruggman

BRAINBERRIES



Gak Nyangka! 6 Bentuk Puser Ini Bongkar Rahasia Usia Hidupmu

HERBEAUTY



Kenapa Pria Suka Wanita Curvy? Jawabannya Bikin Kaget!

HERBEAUTY



These Giant Serpents Will Send Shivers Down Your Spine!

BRAINBERRIES



The Real Reason Trump Has Mysterious Bruises On His Hands

BRAINBERRIES



Sayang Banget! 8 Pasangan Serasi di Serial TV Ini Gagal Jadian

HERBEAUTY

The Real Reason Kate Was Asked To Change Her Name

HERBEAUTY



9 Artis Indo Ini Tunjukan Oplas Bagus - dan Mana yang tidak

HERBEAUTY



Jennifer Lopez Nyaris Hancur Saat Semua Orang Mengiranya Bahagia

HERBEAUTY



6 Bentuk Udel Ini Ternyata Punya Arti Tersembunyi, Kamu Mana?

HERBEAUTY



Istri Bapak Suka Begini? Dia Fix Selingkuh No Debat

BRAINBERRIES

[Baca Berita Lainnya](#)





Hari Lahir Pancasila, Menghidupkan Kembali Semangat Founding Fathers...



Antara Algoritma dan Nurani: Masa Depan Audit di Tengah Dominasi AI



Menguatkan Karakter Akuntan Berbasis Pancasila di Era Kecerdasan Buatan (AI)



Hari Lahir Pancasila: Refleksi Etika Profesi Akuntan di Tengah Kemajuan Teknologi



Hari Lahir Pancasila: Menghidupkan Kembali Semangat Founding Fathers...



Pentingnya Kolaborasi antara Pengurus Yayasan dengan Pengurus Masjid



Saatnya Masyarakat Sipil Mengawal Reformasi Aturan Pemilu 2029



Aktivis Global Sumud Flotilla 2.0 Disiksa dan Dilecehkan, Kekejaman Israel Semakin...

Berita Populer Herald Sulsel

- #1 **DPRD Gowa Digugat ke PN Sungguminasa Terkait Hak Angket Bupati Husniah**
- #2 **Jalan Urip Sumoharjo Makassar Ditutup Total Kamis 4 Juni, Lewat di Jalur Alternatif Ini!**
- #3 **Xavier Marks Realty Celebes Hadir di Makassar, Bawa Gebrakan Real Estate Digital**
- #4 **Pemkab Pangkep Cairkan Gaji ke-13 Rp32 Miliar untuk 4.649 PNS-1.212 PPPK**
- #5 **Harga Emas di Pegadaian 3 Juni 2026 Turun Lagi, Berikut Rinciannya**

Berita Terbaru



Ferdinand "The Dragon" Sinaga Perkuat Dokter Kobo FC, Siap Jadi Kuda Hitam Wali Kota Makassar Cup 2026

3 Juni 2026, 23:24



Mardiana Minta Kader Pengawas Antisipasi Kerawanan Sengketa Pemilu dan PSU

3 Juni 2026, 23:22



Hadiri Audit Itwasum Polri, Kapolres Gowa Tegaskan Komitmen Perkuat Pengawasan Internal

3 Juni 2026, 22:25



DPRD Duga Ada Permainan Harga Pupuk pada 5 Kecamatan di Bone

3 Juni 2026, 22:17



DPRD Gowa Digugat ke PN Sungguminasa Terkait Hak Angket Bupati Husniah

3 Juni 2026, 21:19





[Home](#) • [Redaksi](#) • [Pedoman Media Siber](#) • [Kebijakan Privasi](#) • [Kontak Kami](#)

Terhubung Dengan Kami

Copyright © 2026 HERALD.ID

